

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 67 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 pada tahun berjalan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggarannya perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian pada pelaksanaan rencana kerja Pemerintah Daerah yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka perlu adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 355 ayat (1), Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

BAGIAN HUKUM
SETDA

R.



masyarakat dengan sepenuh hati. Sehingga, Kabupaten Balangan secara umum akan lebih berkarakter untuk dapat menempatkan diri sebagai kabupaten yang tidak selalu berada di bawah, tetapi Kabupaten yang sejajar dengan Kabupaten tetangga, lebih maju dan sejahtera.

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026, yaitu:

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan dan pariwisata serta ekonomi kreatif
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan pemerintahan daerah, rumusan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2022, secara umum berpedoman pada sasaran dan tujuan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. Tujuan dan sasaran ini juga mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam pelaksanaannya desentralisasi penataan daerah ditujukan pada upaya untuk :

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
- e. Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah;
- f. Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Rumusan tentang tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Balangan
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif											
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah														
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
1 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																											
1 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	78,20 (BB) Nilai			68,40 (B) Nilai	70,40 (BB) Nilai	70,40 (BB) Nilai	219,425,564,854	199,081,569,339	210,549,348,039					70,40 (BB) Nilai	223,806,664,919											
1 1 1 2.01						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi	100 %		100 %	100 %	135,350,000	135,338,000	300,338,000				100 %	708,800,000									
1 1 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5 Dokumen	5 Dokumen	8,650,000	8,644,000	23,644,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan	Dlnas Pendidikan	5 Dokumen	600,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN								
1 1 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi					3 Buah	4 Buah	126,700,000	126,694,000	276,694,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan	Dlnas Pendidikan	4 Buah	108,800,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN								
1 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	215,670,528,766	195,212,506,139	199,026,826,139							100 %	215,304,499,719											
1 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peresentse Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				100 Persen	100 Persen	214,943,662,366	194,485,639,739	197,601,559,739		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan	ASN Dinas PEndidikan	100 Persen	213,879,233,319	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN									
1 1 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Bulan	12 Bulan	726,866,400	726,866,400	1,425,266,400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan	ASN Dinas PEndidikan	12 Bulan	1,425,266,400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN									
1 1 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							0	0	1,069,908,000									0									
1 1 1 2.03 3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0 Laporan		0	0	1,069,908,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan	0 Laporan		0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN									
1 1 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pengelolaan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	288,800,000	695,559,200	2,907,359,200							100 %	1,542,559,200											
1 1 1 2.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Jumlah Pakaian Dinas				141 Lembar	141 Lembar	42,300,000	42,300,000	107,100,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan	ASN Dinas Pendidikan	141 Lembar	42,300,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN									
1 1 1 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Bimtek				12 Bulan	12 Bulan	246,500,000	653,259,200	2,800,259,200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan	ASN Dinas Pendidikan	12 Bulan	1,500,259,200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN									
1 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	1,157,382,828	1,157,382,800	4,068,976,500							100 %	3,081,327,800											
1 1 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	32,015,000	32,015,000	50,515,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan	ASN Dinas Pendidikan	12 Bulan	50,515,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN									
1 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	null				4 Paket		0	0	1,142,916,500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan	ASN Dinas Pendidikan	4 Paket	924,720,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN									

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas								
								Semula	Menjadi	RKPd 2022	APBD 2022	RKPd 2022 Perubahan			Nasional	Daerah							
2	16	3	2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Aplikasi Layanan Publik dan Aplikasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Terintegrasi Aspirasi Publik	%		%	100 %	100 %	2,596,251,200	4,457,637,860	5,506,368,860	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	3. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan Paringin	Seluruh Anggota Masyarakat Diskominfo	100 %	2,886,208,820	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			
2	16	3			Percentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi dengan Aplikasi Dashboard Pemerintah Kabupaten Balangan	%		%	70 %	70 %							70 %						
2	16	3			Percentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	%		%	80 %	80 %							80 %						
2	16	3	2.02	2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik				1 Dokumen	0	0	71,015,000			Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	78,116,500	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			
2	16	3	2.02	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Operasional PPID/ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen Pemkab Balangan			1 Dokumen	1 Dokumen	125,250,000	125,249,700	139,969,700	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan Paringin	Seluruh Anggota Masyarakat Diskominfo	1 Dokumen	93,621,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
2	16	3	2.02	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Pembangunan Jaringan Infrastruktur E-Government SKPD Di Kabupaten Balangan			4 Desa	4 Desa	2,471,001,200	4,332,388,160	5,295,384,160	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan Paringin	Seluruh Anggota Masyarakat Diskominfo	4 Desa	2,714,471,320	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						185,680,000	185,679,700	205,280,800									165,000,000			
2	20	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Percentase data yang tersedia untuk mengukur target kinerja perencanaan	%		%	45 %	45 %	185,680,000	185,679,700	205,280,800						45 %	165,000,000				
2	20	2		Percentase elemen data dan informasi yg terpublikasikan dan terupdate	%		%	70 %	70 %														
2	20	2		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Data		Data	5 Data	5 Data									5 Data	165,000,000				
2	20	2	2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Rekomendasi	Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	185,680,000	185,679,700	205,280,800						5 Rekomendasi	165,000,000				
2	20	2			Percentase Data Sektoral Kabupaten Balangan yang akurat	%	%	45 %	45 %									45 %					
2	20	2			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Buku Ekonomi Kabupaten Balangan Jumlah Buku Indikator Sosial Budaya Jumlah Buku Infrastruktur Pembangunan Daerah Jumlah Sumber Data Survey Statistik			5 Data	5 Data	185,680,000	185,679,700	205,280,800				Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Seluruh Masyarakat Kabupaten Balangan	5 Data	165,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						26,400,000	26,400,000	30,800,000									38,500,000			
2	21	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	%		%	18 %	18 %	26,400,000	26,400,000	30,800,000						18 %	38,500,000				
2	21	2			Percentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	SKPD	SKPD	10 SKPD	10 SKPD									10 SKPD					
2	21	2			Terfasilitasinya pengamanan informasi pemerintah daerah	kasus	kasus	15 kasus	15 kasus									15 kasus					
2	21	2	2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang dilayani kebutuhan persandian dan keamanannya secara tepat waktu	OPD	OPD	5 OPD	5 OPD	26,400,000	26,400,000	30,800,000						5 OPD	38,500,000				
2	21	2			Percentase pengelolaan keamanan informasi perangkat daerah	%	%	20 %	20 %									20 %					
2	21	2			Percentase Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	%	%	70 %	70 %									70 %					
2	21	2	2.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Terselenggaranya Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah			24 kasus serangan	24 kasus serangan	26,400,000	26,400,000	30,800,000				Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan Paringin	Seluruh Masyarakat Kabupaten Balangan	24 kasus serangan	38,500,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

**DOKUMEN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(R K P D)
KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDALITBANG)
TAHUN ANGGARAN 2022**



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang bersifat teknis operasional dan merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan serta mengakomodir aspirasi, usulan masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

BAGIAN HUKUM
SETDA

R.



agamis, aman, dan damai. Dari sisi lain muncul slogan masyarakat Kabupaten Balangan yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta membawa nilai religius yang tinggi, dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Sehingga, Kabupaten Balangan secara umum akan lebih berkarakter untuk dapat menempatkan diri sebagai kabupaten yang tidak selalu berada di bawah, tetapi Kabupaten yang sejajar dengan Kabupaten tetangga, lebih maju dan sejahtera.

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026, yaitu:

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan pemerintahan daerah, rumusan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2023, secara umum berpedoman pada sasaran dan tujuan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. Tujuan dan sasaran ini juga mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam pelaksanaannya desentralisasi penataan daerah ditujukan pada upaya untuk :

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;



**Tabel 5.1. Matrik Rencana Program Prioritas Per Urusan
Kabupaten Balangan Tahun 2023**

No (1)	Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Program /Kegiatan (3)	Lokasi (4)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana) Target Capaian Kinerja (5)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (6)	Sumber Dana (7)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan				36.186.320.400	
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				34.186.320.400	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan				34.186.320.400	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan pelayanan publik urusan pemerintah daerah		100 %	6.155.187.400	APBD
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat paritispasi warga negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan dasar		86,45 %	27.141.943.000	APBD
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kurikulum yang sesuai peraturan		100 %	118.690.000	APBD
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase peningkatan angka jumlah guru PNS yang s1 (PAUD, SD dan SMP)		75,36 % 80,39 % 97,04 %	709.270.000	APBD
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Meningkatkan Persentase Lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang mandiri		100 %	61.230.000	APBD
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				2.000.000.000	APBD
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan				2.000.000.000	APBD
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase jumlah lembaga adat tingkat Pengembangan Kebudayaan		23,53 %	14.500.000	APBD
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni		62,5 %	1.026.337.000	APBD



No	Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		Presentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek		100 %			
		Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR)		0,35 Nilai			
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika				11.761.158.800	APBD	
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				11.514.658.800	APBD	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika				11.514.658.800	APBD	
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja		100 %	5.072.836.480	APBD	
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Presentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		18 %	3.941.056.652	APBD	
		Presentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		20 %			
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah		80 %	2.500.765.668	APBD	
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik				220.100.000	APBD	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		70 %	220.100.000	APBD	
	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian				26.400.000	APBD	
	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase pengelolaan keamanan informasi perangkat daerah		100 %	26.400.000	APBD	
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan				8.810.967.387	APBD	